



Lonjakan Capai 35 Ton Per Hari

■ Fasilitas Pengolahan Sampah Baru di Bawuran Siap Operasional Maret

YOGYA. TRIBUN - Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Aris Prasena mengungkapkan, adanya lonjakan volume sampah di wilayah DIY selama hampir dua bulan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi akibat libur sekolah, perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta libur Imlek dan Isra Miraj.

"Lonjakan sampah selama masa libur panjang memang tak bisa dihindari, terutama di Kota Yogyakarta. Meski demikian, kami bersama DLH Kota Yogyakarta telah mengantisipasi agar tak terjadi penumpukan sampah yang kritis di depo-depo," kata Aris, Jumat (31/1).

Lebih lanjut dia mengatakan, secara perbitungan volume produksi dengan pengelolaan sampah di Kota Yogya masih terdapat sisa, yakni sekitar 35 ton per hari. Artinya, 35 ton tersebut masih belum bisa dikelola di Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) milik Kota Yogya.

Maka dari itu hingga saat ini, sisa sampah tersebut didistribusikan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pyungan, karena masuk keadaan darurat. Namun, evakuasi tak dilakukan setiap hari, melainkan berdasarkan kebutuhan.

DLHK DIY berharap, percepatan operasional fasilitas pengolahan sampah baru di Bawuran, Bantul, dapat membantu mengatasi masalah tersebut. "Jika semua sesuai rencana, fasilitas yang dikelola BUMD Bantul ini akan mulai beroperasi penuh pada 1 Maret, setelah uji komisioning yang dijadwalkan pada 15 hingga 20 Februari," jelas Aris.

Fasilitas di Bawuran memiliki kapasitas pengolahan 49 ton sampah per hari yang dapat ditingkatkan hingga 70 ton pada tahap pengembangan. Sampah dari Kota Yogyakarta diproyeksikan menjadi penyumbang utama dengan volume sekitar 40 ton per hari.

Selain Kota Yogyakarta dan Bantul, Aris menyebut Sleman juga tengah menyiapkan tambahan fasilitas pengolahan sampah di Donokerto. "Fisik bangun-

Lonjakan sampah selama masa libur panjang memang tak bisa dihindari, terutama di Kota Yogyakarta.

an sudah selesai. Alat-alat yang dibayai dari dana keistimewaan DIY diharapkan tersedia pada awal tahun ini, sehingga dapat operasional penuh sebelum Juni," tambahnya.

Dengan beroperasinya fasilitas pengolahan di Bawuran serta Donokerto, pengelolaan sampah DIY diharapkan lebih terkendali. "Harapannya, tak perlu lagi ada evakuasi darurat ke TPA Pyungan," ujar Aris.

Langkah konkret

Pemda DIY menerima surat rekomendasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DIY terkait permasalahan pengelolaan sampah dan limbah di TPA Pyungan.

Sekda DIY, Beny Suharsono menyatakan, bahwa masukan berbagai pihak, termasuk Walhi, akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola lingkungan ke depan.

"Kami menghormati pandangan itu. Saya kira rekomendasi juga konkret untuk dilakukan," ujarnya, Jumat (31/1).

Beny menegaskan, bahwa Pemda DIY telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan persampahan. Namun, ia menekankan bahwa penanganan sampah harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, bukan sekadar retorika.

Dia juga menjelaskan, setiap kabupaten dan kota yang meminta tambahan kuota distribusi sampah ke TPA Pyungan telah difasilitasi. Meski begitu, tumpukan sampah di beberapa depo, khususnya di Kota Yogyakarta, masih menjadi persoalan.

"Kemarin minta dispo ke DLH untuk bantu kosongkan, minta 1.000 ton

ternyata belum begitu ngaruh," ungkapnya.

Menanggapi isu limbah air lindi yang disebut mencemari Sungai Opak dan sumur warga, Beny memastikan bahwa lindi dari TPA Pyungan tak dibuang langsung ke sungai.

"Lindi di TPA Pyungan itu tidak dibuang ke Sungai Opak, ada penampungan sendiri," katanya.

Kurang serius

Sebelumnya, Walhi DIY menilai, bahwa pengelolaan sampah di DIY masih jauh dari kata berhasil. Kepala Divisi Kampanye Walhi DIY, Elki Setyo Hadi menyebutkan, selama 2023 hanya 28,69 persen sampah di TPA Pyungan yang terolah. Sisanya, sekitar 1.046 ton sampah per hari, dibuang tanpa upaya pengurangan dan penanganan yang memadai.

"Salah satu bentuk ketidakseriusan tata kelola sampah di DIY, adalah alokasi anggaran yang diterapkan," ujarnya.

Berdasarkan Permendagri Tahun 2010, anggaran penanganan sampah idealnya sebesar tiga persen dari total belanja daerah. Namun, Pemda DIY disebut hanya mengalokasikan anggaran di bawah dua persen.

Ketidakoptimalan anggaran ini, menurut Elki, berdampak pada buruknya pengelolaan sampah, termasuk penanganan limbah air lindi di TPA Pyungan. Walhi menilai, air lindi tersebut telah dikembalikan ke medium alam dengan memanfaatkan Sungai Opak, meski kualitas air sungai menunjukkan adanya pencemaran.

"Hasil temuan kami menunjukkan beberapa parameter kimia dan fisik air sudah melebihi baku mutu kelas dua yang diperuntukkan untuk air sungai," jelas Elki.

Atas temuan tersebut, Walhi DIY telah mengajukan surat keberatan kepada Gubernur DIY pada 23 Januari 2025. Organisasi lingkungan ini mendesak adanya perbaikan tata kelola sampah serta pengelolaan limbah yang lebih serius demi menjaga kelestarian lingkungan di Yogyakarta. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005